



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 3 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (BKN)

UNIT KERJA : DEPUTI BIDANG PEMBINAAN PENYELENGGARAAN MANAJEMEN APARATUR

SIPIL NEGARA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : HERMAN

2. Jabatan : DEPUTI

3. NHK : 175348

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 1.865.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/90 m2 di KAB / KOTA KOTA
JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 650.000.000

2. Tanah dan Bangunan Seluas 197 m2/200 m2 di KAB / KOTA KOTA
JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 1.215.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 411.500.000

1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2012, HASIL SENDIRI
Rp. 5.000.000

2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2021, HASIL SENDIRI
Rp. 22.000.000

3. MOBIL, TOYOTA MAGA10R-BRXLBD20GCT Tahun 2023,
HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000

4. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2025, HASIL SENDIRI
Rp. 34.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 13.500.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 100.000.000

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 2.390.000.000

III. HUTANG

Rp. 62.540.000

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)****Rp. 2.327.460.000**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.